



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM/AUDIENSI KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN; PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;
PEMBANGUNAN PERDESAAN, KAWASAN TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI; BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA; SERTA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN/BASARNAS)**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Sidang	: V
Rapat	: Ke –
Jenis Rapat	: Audiensi
Sifat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Jum'at, 28 Juni 2024
Pukul	: 10.00 – WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V DPR RI
Acara	: Perihal kunjungan kerja tindak lanjut aspirasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Ketua Rapat	: Drs. HAMKA B. KADY MS. (Anggota Komisi V DPR RI/FP GOLKAR)
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti,S.H
Hadir Anggota	: 1 orang dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI
Mitra Kerja	: -

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.00 WIB, Rapat dipimpin oleh Drs. HAMKA B. KADY MS. (Anggota Komisi V DPR RI/FP GOLKAR, Dapil Sulawesi Selatan I).
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa rapat hari ini mengenai penyampaian aspirasi dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat, mahasiswa, serikat buruh/pekerja terkait dengan penolakan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)
3. Ketua rapat mempersilahkan kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan aspirasi.

II. RINGKASAN ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN

1. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan membawa masyarakat yang tergabung dalam organisasi mahasiswa dan serikat pekerja untuk dapat menyampaikan langsung aspirasinya kepada Bapak Ibu anggota DPR RI, sebagai berikut :
 - Tapera melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, dengan adanya kewajiban iuran melalui program Tapera buruh harus membayar 2,5 persen dari gaji dan pemberi kerja membayar 0,5 persen dari gaji, diyakini akan makin menggerus daya beli masyarakat. sehingga kami menolak rencana Tapera yang tidak pro terhadap rakyat. Dengan pertanggung jawaban yang belum jelas. Serta kondisi pekerja yang sangat tertekan akibat dikenakan berbagai potongan wajib serta pajak penghasilan. BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan, dan Jaminan Hari Tua
 - Pada beberapa wilayah hukum Polda di Indonesia khususnya pada wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan telah menerapkan dan mensyaratkan wajib BPJS Kesehatan pada pengurusan SIM dan SKCK yang tentu kami menilai itu tidak ada relevansinya, tak memiliki landasan yang secara yuridis dan filosofis. Kami tidak menginginkan program dan pengelolaan dana masyarakat yang tidak transparan dan tidak jelas peruntukannya. Sehingga kami tolak pengurusan SIM, SKCK dan pengurusan administrasi lainnya yang mensyaratkan wajib peserta BPJS Kesehatan.
 - Sebaiknya pemerintah mencabut Permendibudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Biaya UKT. Kemudian pemerintah harus merubah konsep Pendidikan di Indonesia dengan mengembalikan fungsi dan tujuan pendidikan sebagai akses bagi masyarakat dalam menempuh Pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa adanya perbedaan apapun.
2. Berikut tambahan dari aspirasi dari Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut :

- Kami apresiasi sikap pemerintah menunda pelaksanaan Tapera ini dan bagaimana respon komisi V terkait Tapera

III. TANGGAPAN KOMISI V DPR RI

1. Tapera Merupakan persoalan sulit bagi masyarakat, sehingga harus kita pikirkan secara bersama terkait Tapera ini, Sehingga dengan pertemuan ini sangat penting agar menjadi bahan untuk kami sampaikan kepada pemerintah.
2. Pada pertemuan dengan pemerintah baik Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat, khususnya mitra kerja Komisi V DPR RI akan kami sampaikan aspirasi ini khususnya terkait Tapera.
3. Kita harapkan semua aspirasi yang disampaikan baik pembangunan jangka pendek dan jangka panjang dapat terealisasi, dan kami akan sampaikan langsung kepada mitra Komisi V DPR RI saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat.

IV. PENUTUP

Demikian laporan Audiensi dengan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai catatan tertulis dan akan disampaikan langsung kepada Mitra Kerja Komisi V DPR RI pada Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat.

Jakarta, 28 Juni 2024

A.n. Ketua Rapat
Sekretaris,

ttd

Nunik Prihatin Budiastuti,S.H.
NIP. 196912021998032002

LAMPIRAN:

A. PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI V DPR RI YANG MENERIMA AUDIENSI

1. BAPAK Drs. HAMKA B. KADY MS. (Anggota Komisi V DPR RI / FP GOLKAR, Dapil Sulawesi Selatan I).
2. Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, S.E., MAP (Anggota Komisi IX DPR RI / FP Demokrat, Dapil Sulawesi Selatan I)
3. Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, MSc (Anggota Komisi VII DPR RI / F PAN, Dapil Sulawesi Selatan II)

B. PESERTA AUDIENSI ANTARA LAIN:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Andi Ina Kartika Sari	Ketua DPRD Sulsel
2.	Ir. Irwan Hamid	Komisi C DPRD Sulsel
3.	Usman Lonta	Komisi C DPRD Sulsel
4.	Fahrudin Rangga	Komisi C DPRD Sulsel
5.	A. Muh. Ifan AB	Komisi C DPRD Sulsel
6.	A. Monginsidi M	Komisi C DPRD Sulsel
7.	Wahyuddin M. Nur	Komisi C DPRD Sulsel
8.	Sulle Ks Dalle	Komisi C DPRD Sulsel
9.	Isayani	Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel
10.	Capt Hariadi SE., M.Mar	Komisi B DPRD Sulsel
11.	Vera Virdaus	Komisi B DPRD Sulsel
12.	Henny Lasif	Komisi B DPRD Sulsel
13.	Rismawati Kadir Nyampa ST.	Fraksi Demokrat DPRD Sulsel

14.	Arimuddin Korlas	Komisi A DPRD Sulsel
15.	Husmaruddin	Komisi A DPRD Sulsel
16.	Azhar Arsyad	Komisi D DPRD Sulsel
17.	Nurhidayati	Komisi A DPRD Sulsel
18.	Andi Janur Juang	Anggota DPRD Sulsel
19.	Asdar	Polrestabes Polda Sulsel
20.	Husain	Polrestabes Makassar
21.	Emma Saiti	Set. DPRD Sulsel
22.	Andi padauleng	Fungsional Set. DPRD Sulsel
23.	Dr. Aerin Nizal	T.A. DPRD Sulsel
24.	Andi Nila Ratna Sari	Staf
25.	Andi Makoto Sakti	Ajudan Ketua DPRD Sulsel
26.	Hasna H	Staf
27.	Junaedi	Staf
28.	Azwan Chaidir	Staf
29.	Moh. Aswan	Staf Pimpinan
30.	Dairul Ilham	Staf Aspirasi
31.	Nawir kalling	Ketua HMI Gowa raya
32.	Muhammad Amri	Sekum HMI Gowa Raya
33.	Abd. Rozak Usman	PTKP Cagora
34.	Andi Akram Al Kadri	Kabid Kesmas
35.	Aenul Ikhsan	Dir. LKBHMI Cagora
36.	Sarah Agusalmim	Ketua HMI Cab. Makassar

37.	Ridwan	Ketum Permahi Makassar
38.	Fikasianus Ichang	Ketua KSPTI Makassar
39.	Ahmad Zulfikar	KSPTI Makassar
40.		

C. SURAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 59 Telp. (0411) 453646-453461 Fax. 453562
M A K A S S A R Kode Pos 90232

Makassar, 26 Juni 2024

K e p a d a

Yth. Pimpinan Komisi V DPR RI
Di-

Nomor : *162/106/0000*

Lampiran :

Perihal : Kunjungan Kerja Tindaklanjuti Aspirasi

Jakarta

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak, bahwa Tim Aspirasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akan *menindaklanjuti aspirasi Masyarakat, Mahasiswa dan Serikat Buruh/Pekerja terkait dengan Penolakan Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)* yang merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat di Jakarta

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuannya untuk memfasilitasi Kunjungan Kerja Tim Aspirasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Jumat, 28 Juni 2024

Pukul : 10.00 Wib

Tempat : Kantor DPR RI

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ketua,

A. INA KARTIKA SARI, SH, M.Si

Dipindai dengan CamScanner